

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan yang dihadapinya, seperti rendahnya pendapatan perkapita, tingginya angka pengangguran, serta kondisi ekonomi dan sosial yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara maju. Banyak aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Indonesia guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kepadatan penduduk di kota-kota besar, Jakarta, turut berdampak pada terbatasnya peluang kerja. Akibatnya, penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau keterampilan untuk berwirausaha cenderung memiliki pendapatan rendah dan kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga.¹

Salah satu aspek penting dalam upaya pembangunan ekonomi adalah tenaga kerja sebagai sumber daya manusia. Dengan jumlah tenaga kerja yang besar, suatu negara dapat memanfaatkan potensi sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, menghadapi berbagai tantangan sosial akibat kepadatan penduduk. Ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang

¹ Hendri Andika Saputra and Irsad Lubis, "Pengaruh Jumlah Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia," *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 6, no. 2 (2023): 529–540.

tersedia dan terbatasnya lapangan kerja yang ada menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. besar, suatu negara dapat memanfaatkan potensi sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, menghadapi berbagai tantangan sosial akibat kepadatan penduduk.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan. Data TPT periode 2017-2023 menunjukkan pola fluktuasi yang menarik untuk dianalisis. Pada 2017 hingga 2019, TPT cenderung menurun, dari 5,33% pada Februari 2017 menjadi 4,98% pada Februari 2019. Penurunan ini mencerminkan stabilitas ekonomi yang mendorong terciptanya lebih banyak lapangan kerja. Namun, lonjakan signifikan terjadi pada 2020, dengan TPT mencapai 7,07% pada Agustus, akibat dampak pandemi COVID-19 yang menghentikan aktivitas ekonomi secara global, terutama di sektor informal yang banyak menyerap tenaga kerja. Memasuki 2021, TPT mulai turun secara bertahap, meskipun masih berada di atas level pra-pandemi, yaitu 6,26% pada Februari dan 6,49% pada Agustus. Pemulihan semakin terlihat pada 2022 dan 2023, dengan TPT turun menjadi 5,83% pada Februari 2022 dan terus membaik hingga mencapai 5,45% pada Februari 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi melalui berbagai program ketenagakerjaan dan

kebijakan fiskal mulai memberikan hasil positif.² Namun, fluktuasi ini juga menyoroti tantangan struktural dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Tingkat pendidikan yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pasar, serta kebijakan upah minimum yang beragam di setiap daerah, dapat memengaruhi kemampuan sektor usaha dalam menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, analisis ini menjadi penting untuk memahami hubungan antara tingkat pendidikan, kebijakan upah minimum, dan TPT, guna merumuskan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas serta mengurangi pengangguran secara berkelanjutan.³

Pengangguran yang semakin meningkat merupakan masalah yang lebih rumit dan serius daripada perubahan dalam distribusi pendapatan yang tidak menguntungkan penduduk berpendapatan rendah. Besarnya angka pengangguran dapat dikatakan sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Karena pengangguran merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dihasilkan oleh pembangunan ekonomi.⁴

² <https://sumut.bps.go.id/indicator/6/188/1>, "Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah), 2017-2022."

³ Hendrizal et al., "Investasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic)* 05, no. 01 (2024): 81–90, <https://www.ejournal.mannawasalwa.ac.id/index.php/elkahfi/article/view/232>.

⁴ Maria G. Egeten, George M.V Kawung, and Krest D.Tolosang, "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota-Kota Yang Ada Di Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23, no. 3 (2023): 25–36, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/46512%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/download/46512/41659>.

Tingginya angka pengangguran sebagian besar disebabkan oleh standar perekrutan yang tinggi dari perusahaan, serta pemutusan hubungan kerja akibat resesi ekonomi. Banyak perusahaan menetapkan persyaratan minimal, seperti gelar diploma atau sarjana, untuk calon karyawan. Oleh karena itu, pengangguran menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pemerintah yang bertugas menjaga kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu segera mencari solusi dengan merancang rencana yang sistematis dan strategis untuk mengatasi masalah pengangguran. Berdasarkan definisi umum, pengangguran merujuk pada individu yang berada dalam usia kerja, ingin bekerja, namun belum mendapatkan pekerjaan.⁵

Menurut Arsyad Beberapa masalah ketenagakerjaan yang dapat memengaruhi pengangguran adalah sebagai berikut: Pertama, ada penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualifikasi di pasar tenaga kerja meskipun permintaannya ada; kedua, masalah upah yang berdampak pada tingkat pengangguran secara langsung dan tidak langsung; ketiga, inflasi mendorong perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja mereka; dan keempat, pertumbuhan ekonomi tidak dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja sehingga lebih banyak tenaga kerja tidak dapat diserap.⁶

⁵ Yulna Dewita Hia, "Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran," *Economica* 1, no. 2 (2015): 208–213.

⁶ Dewi Mudawamah, Binti Mustafarida, and Yuliani Yuliani, "Dampak Inflasi Terhadap Pengangguran Di Indonesia," *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 209–217.

Penetapan upah oleh pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pengangguran, jika pemerintah menetapkan upah yang tinggi. Perusahaan cenderung mengurangi jumlah karyawan, yang dapat meningkatkan angka pengangguran. Kenaikan upah menyebabkan peningkatan biaya operasional perusahaan, sehingga perusahaan perlu menghemat dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Pemerintah menetapkan upah minimum untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan pekerja.

Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan pekerja, pemerintah secara berkala menilai dan menyesuaikan kebijakan upah minimum. Evaluasi ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi saat ini, tingkat inflasi, dan kemampuan industri untuk menyesuaikan biaya operasional. Dengan pendekatan ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa upah minimum tetap adil bagi pekerja tanpa membebani perusahaan secara berlebihan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi potensi dampak negatif dari penetapan upah yang terlalu tinggi, seperti kenaikan angka pengangguran, sambil tetap melindungi hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang memadai.⁷

Penelitian mengenai pengangguran sangat krusial karena pengangguran dapat menjadi gejala sosial dan politik yang berpotensi

⁷ Limega Candrasa, "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pariwisata Di Sumatera Utara," *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 3 (2022): 159–168.

mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara. Tingginya angka pengangguran dapat mengurangi daya beli masyarakat, karena individu yang menganggur tidak mampu menghasilkan pendapatan atau mendapatkan pekerjaan yang memadai.⁸

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, peneliti ingin menyelidiki secara menyeluruh bagaimana pendidikan dan angkatan kerja berdampak pada pengangguran terbuka di Indonesia dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia (Tahun 2017–2023)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2017-2023?
2. Sejauh mana kebijakan upah minimum mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di seluruh provinsi Indonesia selama periode tersebut?
3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat

⁸ Sabina Gimun et al., “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Angkatan Kerja Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Mimika,” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 4 (2024): 9130–9139.

pendidikan, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka di berbagai wilayah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2017-2023?
2. Untuk mengetahui Sejauh mana kebijakan upah minimum mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia selama periode tersebut?
3. Untuk mengetahui Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka di berbagai wilayah di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan guna untuk menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, UIN Imam Bonjol Padang. Serta menambah

keahlian ilmu pengetahuan bidang ilmu ekonomi, dan melatih penulis untuk mendapatkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan.

2. Bagi Akademi

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang dan penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Indonesia.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Indonesia dengan mempertimbangkan variasi antar wilayah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan mengetahui keseluruhan pembahasan dari proposal ini, maka perlu ditampilkan sistematika dalam penulisan proposal ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menampilkan latar belakang, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian landasan teori akan dilakukan menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu, *literature review* dan kajian pustaka. Kajian teoritis yang terdiri dari pembahasan tentang tingkat pendidikan dan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka saat ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini dibahas Jenis penelitian, Populasi dan Sampel, Variabel Penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dikaji hasil dari pembahasan topik dan menjawab rumusan masalah

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan di tunjukkan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan terkait dengan topik penelitian.